

PELAKSANAAN DISPARITAS DI DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Oleh

**NAMA : ARIFIAN SUTIYONO
NPM : 201210115214**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Disparitas Di Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi
Nama Mahasiswa : Arifian Sutiyono
Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115214
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, 1 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. LUKMAN HAKIM, SH, MH
NIP: 10803027



DR. GATOT EFRIANTO, SH, MH
NIP: 10909020

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Disparitas di Dalam
Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Arifian Sutiyono

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115214

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, 1 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, SH, M.Hum
NIP. 201805008

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, SH, MH
NIP. 11606051

Penguji II : Dr. Gatot Efrianto, SH, MH
NIP. 10909020



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SH, M.Ag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul: “PELAKSANAAN DISPARITAS DI DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI”

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 01 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,



Arifian Sutiyono
NPM: 201210115214

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifian Sutiyono
NPM : 201210115214
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PELAKSANAAN DISPARITAS DI DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menyatakan,



(Arifian Sutiyono)

ABSTRAK

Arifian Sutiyono, 201210115214, Pelaksanaan Disparitas Didalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Dimana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK. Oleh karena itu, dalam skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah: Bagaimana terjadinya disparitas putusan hakim antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.?, Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. telah mencerminkan tujuan hukum?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang dimana isi dibuat dan disusun secara sistematis dan menyeluruh. Analisis deskripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat yuridis yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dalam kasus ini, dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, motif, dan status sosial terdakwa. Terhadap kedua kasus yang diteliti ini hakim dalam memutuskan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda sehingga muncul disparitas di dalam putusannya, ada beberapa alasan dalam hal ini yaitu, pertama, jarak antara minimal dan maksimal hukuman penjara tidak terlampau jauh. Sehingga hakim bebas menentukan rentang waktu tersebut; Kedua, jumlah kerugian negara sama antara putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan putusan nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.

Kesimpulannya bahwa, ukuran dan landasan yang sama di antara para pelaku dalam perkara yang sama, apalagi dalam kedua kasus ini diserahkan kepada Majelis Hakim yang sama. Sehingga perbedaan putusan yang cukup berbeda terutama dilihat dari segi kerugian negara dan perihal uang pengganti ini sangat terlihat.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pidana Korupsi

ABSTRACT

Arifian Sutyono, 201210115214, *Implementation of Disparities in the Decision of Judges of Corruption.*

The issue of criminal disparity has actually been a concern of the Supreme Court for a long time. This is evidenced through the Supreme Court Circular of the Republic of Indonesia, Number 14 of 2009 concerning the Development of Judge Personnel. Where one of the points in it ordered the Heads of Appellate Courts should keep the decision disparity from happening. In its implementation, the Circular issued by the Supreme Court seemed to proceed without supervision and evaluation. Even though the Circular could be an entry point to reduce the occurrence of criminal disparities. On the other hand, to reduce the occurrence of criminal disparities is not only the responsibility of the Supreme Court. But also, there are public prosecutors in relation to prosecution in the Court, which in this case is the Attorney General's Office and the KPK. Therefore, in this thesis the problem is: How is the disparity of the judge's decision between the District Court Decision Number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg with the Decision of the District Court Number 48/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg.?, Is the District Court Judge's Decision Number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg with the District Court's Decision Number 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. has reflected the purpose of the law?

This research is a type of normative legal research. This research is also a descriptive analysis in which the contents are made and arranged systematically and thoroughly. Description analysis is intended to describe all data obtained relating to the title of the research clearly and in detail which is then analyzed in order to answer the existing problems.

The results of this study indicate that judges' judgment in providing decisions are divided into two, namely juridical, namely prosecutor's indictment, statements of defendants and witnesses, evidence and related articles in this case, and non-juridical matters which are burdensome and alleviating, motives, and the defendant's social status. With regard to the two cases examined, the judge in deciding has different considerations so that disparities appear in his decision, there are several reasons in this regard, namely, first, the distance between the minimum and maximum prison sentences is not too far away. So that the judge is free to determine the time span; Second, the amount of state loss is the same between decision number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg with decision number 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg..

The conclusion is that, the same size and foundation of the perpetrators in the same case, especially in both cases handed over to the same Panel of Judges. So that the difference in decisions is quite different, especially in terms of state losses and about the replacement money is very visible.

Keywords: Disparity, Judge Decision, Criminal Corruption.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya senantiasa memberikan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul: “Pelaksanaan Disparitas Di Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud bila tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari hati sanubari yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan kepemimpinan beliau, penulis diberikan peluang untuk menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, SH, MH Pembimbing I dan Bapak Dr. Gatot Efrianto, SH, MH selaku Pembimbing II. yang selalu memberikan dorongan dengan tulus selama bimbingan skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menjadi Mahasiswa.
5. Semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kepala Perpustakaan STIK Jakarta beserta Staf, Kepala Perpustakaan Divbinkum Polri beserta Staf, Kepala Bidang Perpustakaan Pusat Sejarah Polri beserta Staf, yang telah memberikan peluang untuk mencari data-data dalam penulisan skripsi ini.

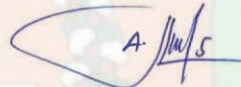
7. Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang memberi kesempatan kepada penulis dalam penelitian yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalas amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut di atas. Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan serta do'a dari keluarga dan rekan-rekan penulis. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amiiin.

Jakarta, 1 Agustus 2019

Penulis



ARIFIAN SUTYONO
NPM: 201210115214



DAFTAR ISI

	Hlm
COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	30
2.3. Pengertian Disparitas Putusan Hakim.	43
BAB III HASIL PENELITIAN.....	52
3.1. Temuan Hasil Penelitian.....	52
3.2. Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 46/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Bdg.....	58
3.3. Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor: 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.....	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	82
4.1. Faktor-faktor terjadinya Putusan Hakim Pengadilan	

	Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.....	85
4.2.	Tujuan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.....	103
BAB V	PENUTUP.....	123
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LAMPIRAN		



MOTO DAN PERSEMBAHAN

JADILAH SEPERTI KARANG DI LAUTAN YANG KUAT DIHANTAM OMBAK DAN KERJAKANLAH HAL YANG BERMANFAAT UNTUK DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN, KARENA HIDUP HANYALAH SEKALI.

INGAT HANYA PADA ALLAH APAPUN DAN DIMANAPUN KITA BERADA KEPADA DIA-LAH TEMPAT MEMINTA DAN MEMOHON.

KARYA TULIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA AYAH TERCINTA DAN IBUNDA TERCINTA SERTA ISTERI YANG SELALU MENGHIBURKU SERTA ANAKU YANG MANANTIKAN KEBERHASILANKU, KEPADA TEMAN-TEMAN DAN SAHABATKU YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN SERTA MOTIVASI.